

**PEMIKIRAN PROF.DR.WARSITO UTOMO TENTANG  
KRISTIANITAS DALAM KANCAH PERPOLITIKAN NASIONAL**



**ANGGITING SATRIO GALANG**

**NIM:01.07.2140**

**SKRIPSI INI UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM MENCAPAI  
GELAR SARJANA PADA FAKULTAS TEOLOGI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA**

**JANUARI, 2016**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
Skripsi dengan judul:  
**PEMIKIRAN PROF. DR. WARSITO UTOMO TENTANG KRISTIANITAS DALAM  
KANCAH PERPOLITIKAN NASIONAL**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh :  
**Anggiting Satrio Galang**  
**NIM: 01. 07.2140**  
dalam Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Teologi  
Fakultas Teologi  
Universitas Kristen Duta Wacana  
dan dinyatakan **DITERIMA** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Sains (S.Si) Teologi pada tanggal 20 Januari 2016

**Nama Dosen**

**Tanda Tangan**

1. Pdt. Dr. Wahyu Nugroho, M.A.  
(Dosen Pembimbing dan Penguji)



2. Pdt. Jeniffer Fresy Porielly Wowor, M.A  
(Dosen Penguji)



3. Pdt. Dr. Djoko Prasetyo A. W. Th.M.  
(Dosen Penguji)



Yogyakarta, 29 Januari 2016

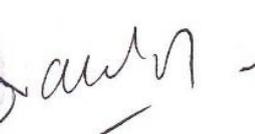
**DU TA WACANA**

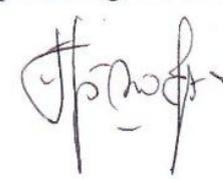
Disahkan oleh:

Dekan,

Kepala Program Studi S-1



  
Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS., Ph.D

  
Pdt. Jeniffer Fresy Porielly Wowor, M.A

## KATA PENGANTAR

Perjalanan menempuh studi di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta yang penulis alami bukanlah dalam rentangan waktu yang sebentar. Dalam waktu yang tidak sebentar itu penulis juga sempat bergulat dengan beberapa kali harus membuat skripsi ulang. Namun kesemuanya itu *Puji Tuhan* dapat terselesaikan bukan karena kemampuan yang penulis miliki semata, namun juga banyak “tangan-tangan Tuhan” yang turut membantu dan memberi pertolongan kepada penulis baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung dan tanpa mereka ada dan bersedia menolong maka tugas-tugas yang diserahkan kepada penulis tentunya tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang ada ini. Untuk itu penulis memiliki keyakinan dan pandangan bahwa dalam perjalanan menempuh studi dengan penyelesaian tugas-tugas yang ada ini penulis tidak sendirian melainkan ada Tuhan yang turut berkarya dari permulaan jaman hingga saat ini dan karya-Nya hadir dalam hidup penulis. *“Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah”* (Roma 8,28). Tuhan yang telah bekerja ini juga akan terus bekerja-berkarya dalam kehidupan penulis sampai pada kesudahannya.

Untuk pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan trimakasih kepada pihak-pihak yang bersedia menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi penulis antara lain:

- **Yesus**, yang mengajarkan kepada penulis siapa itu Allah dan karya-Nya dalam dunia ini. Selain itu, Yesus juga yang memberi inspirasi kepada penulis untuk meneruskan tujuan hidup-Nya, yakni mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Serta penyertaan-Nya yang penulis alami dalam kehidupan ini.
- **Mama, Papa serta keluarga besar baik yang ada di Jogja maupun yang ada di Maluku**, yang memberikan dukungan kepada penulis, secara khusus dengan penyelesaian tugas akhir yang penulis buat, sungguh bantuan yang diberikan meringankan tugas tersebut.

- **Gereja Kristen Indonesia (GKI)**, yang telah memberikan rekomendasi dan memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar Teologi serta memberi kesempatan melayani di GKI.
- **GKI Gondomanan**, Yogyakarta yakni segenap penatua, pendeta, staff kantor Tata Usaha (TU) serta aktifis yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir. GKI Gondomanan juga menjadi tempat awal bagi penulis untuk mengenal “Apa itu Teologi?” (lewat seminar teologi awam kala itu) serta tempat pertama penulis mengenal dunia pelayanan gerejawi.
- **Segenap dosen dan karyawan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW)** khususnya fakultas Teologia UKDW (terlebih lagi untuk **ibu Henny** yang banyak membantu-trimakasih ibu), yang telah memfasilitasi penulis untuk belajar Teologi di UKDW.
- **Pdt. Dr. Wahyu Nugroho, M.A.** yang bersedia membimbing skripsi selama satu semester ini.
- **Pdt. Wahyu Satrio Wibowo, Ph.D.** yang memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik
- **Pdt. Jeniffer Fresy Porielly Wowor, M.A.** dan **Pdt. Dr. Djoko Prasetyo Adi Wibowo, Th. M.** yang telah menguji skripsi penulis. Masukan dan kritikan beliau-beliau ini membuat penulis lebih mendalami pemikiran Prof. Dr. Warsito Utomo serta mengetahui manfaatnya yang lebih luas bagi gereja.
- **Teman-teman angkatan 2007** yang pernah belajar dan hidup bersama selama dua tahun di asrama, trimakasih untuk kebersamaanya.
- **PakSan dan Bu Ning** atas bantuan yang diberikan kepada keluarga dan penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu ditambah lagi penulis juga memiliki keterbatasan untuk mengetahui pihak-pihak yang memberikan dukungan dan bantuan. Namun penulis menyadari bahwa tanpa mereka juga maka penulis tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Pada akhirnya, kiranya bantuan, dukungan, pelajaran yang diberikan kepada penulis dapat berguna bagi kehidupan penulis di masa kini dan masa mendatang. Tuhan memberkati semua kebaikan kita.

Griya Wulung, 27 Januari 2016

Anggiting Satrio Galang

## DAFTAR ISI

<b>Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>vii</b>
<b>Pernyataan Intergritas.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Pertanyaan Penelitian.....	3
3. Pemilihan Judul.....	4
4. Tujuan Penulisan.....	4
5. Metodologi Penelitian.....	4
6. Telah Pustaka.....	6
7. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II DEMOKRASI PANCASILA DAN DEMOKRASI INDONESIA</b> .....	<b>19</b>
1. Demokrasi Pancasila.....	19
2. Demokrasi Indonesia.....	22
3. Pemikiran Prof.Dr.Warsito Utomo tentang Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Indonesia.....	27
4. Pembahasan.....	30
<b>BAB III POLITIK AGAMA-AGAMA DI INDONESIA.....</b>	<b>33</b>
1. Agama dan Politik di Indonesia.....	33
2. Pemikiran Prof.Dr.WarsitoUtomo tentang Politik Agama-Agama Di Indonesia.....	48
3. Pembahasan.....	53

**BAB IV PEMIKIRAN PROF.DR.WARSITOUTOMO TENTANG KRISTIANITAS  
DALAM KANCAH PERPOLITIKAN NASIONAL**

.....	<b>60</b>
1. Pemikiran Prof.Dr.Warsito Utomo tentang Kristianitas dalam Kancah Perpolitikan Nasional.....	60
2. Pemahaman Jemaat,Gereja,dan Masyarakat Kristen terhadap Posisi dan Perannya dalam Perpolitikan Nasional.....	71
<b>BAB V REFLEKSI TEOLOGIS DAN KESIMPULAN.....</b>	<b>79</b>
1. Refleksi Teologis.....	79
2. Kesimpulan.....	81
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>84</b>

©UKDW

## ABSTRAK

### **Pemikiran Prof. Dr. Warsito Utomo Tentang Kristianitas Dalam Kancah Perpolitikan Nasional.**

**Oleh: Anggiting Satrio Galang (01072140)**

Politik sering diidentikan dengan sesuatu yang “keras”, “kotor”, “saling jegal”, “penuh intrik”, “manipulasi”. Dengan pengertian yang demikian sering membuat orang termasuk orang Kristen enggan untuk terlibat dalam dunia politik. Bila ada orang Kristen terlibat dalam dunia politik tentunya mengalami semacam kebingungan karena orang tersebut seolah hidup dalam dua dunia yakni sebagai “warga dunia” dan “warga gereja”. Di dalam kehidupan sebagai bagian dari masyarakat dan keikutsertaan berpolitik orang menggunakan nilai-nilai yang pada umumnya dinilai sebagai nilai-nilai yang “negatif” namun ketika menjadi “warga gereja” nilai-nilai yang ditampilkan adalah nilai-nilai yang berkebalikan. Oleh karena itu penulis berusaha menggali pemikiran-pemikiran Prof. Dr. Warsito Utomo dalam kaitannya dengan pengaplikasian nilai-nilai Kekristenan atau nilai-nilai yang diyakini gereja sebagai sesuatu yang luhur, baik dan mulia. Sehingga muncul dua pemikiran utama yakni: Bagaimana nilai-nilai Kekristenan dapat dijadikan sebagai pedoman atau nilai-nilai yang “menggarani” kehidupan politik kita sebagai warga masyarakat dan bangsa serta negara Indonesia. Kemudian yang kedua yakni: Bagaimana gereja sebagai kekuatan moral (*moralforce*) berperan mendampingi warganya yang terlibat maupun yang akan terlibat dalam politik praktis sehingga dapat setia dengan nilai-nilai Kekristenan yang ada.

**Kata Kunci:** Pemikiran Prof. Dr. Warsito Utomo, Politik, Perpolitikan Nasional, Kristianitas.

**Lain-lain:**

viii + 86; 2016  
29 (1957-2013)

**Dosen Pembimbing:** Pdt. Dr. Wahyu Nugroho, M.A.

## PERNYATAAN INTERGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Januari 2016

Penulis,



Anggiting Satrio Galang

## ABSTRAK

### **Pemikiran Prof. Dr. Warsito Utomo Tentang Kristianitas Dalam Kancah Perpolitikan Nasional.**

**Oleh: Anggiting Satrio Galang (01072140)**

Politik sering diidentikan dengan sesuatu yang “keras”, “kotor”, “saling jegal”, “penuh intrik”, “manipulasi”. Dengan pengertian yang demikian sering membuat orang termasuk orang Kristen enggan untuk terlibat dalam dunia politik. Bila ada orang Kristen terlibat dalam dunia politik tentunya mengalami semacam kebingungan karena orang tersebut seolah hidup dalam dua dunia yakni sebagai “warga dunia” dan “warga gereja”. Di dalam kehidupan sebagai bagian dari masyarakat dan keikutsertaan berpolitik orang menggunakan nilai-nilai yang pada umumnya dinilai sebagai nilai-nilai yang “negatif” namun ketika menjadi “warga gereja” nilai-nilai yang ditampilkan adalah nilai-nilai yang berkebalikan. Oleh karena itu penulis berusaha menggali pemikiran-pemikiran Prof. Dr. Warsito Utomo dalam kaitannya dengan pengaplikasian nilai-nilai Kekristenan atau nilai-nilai yang diyakini gereja sebagai sesuatu yang luhur, baik dan mulia. Sehingga muncul dua pemikiran utama yakni: Bagaimana nilai-nilai Kekristenan dapat dijadikan sebagai pedoman atau nilai-nilai yang “menggarani” kehidupan politik kita sebagai warga masyarakat dan bangsa serta negara Indonesia. Kemudian yang kedua yakni: Bagaimana gereja sebagai kekuatan moral (*moralforce*) berperan mendampingi warganya yang terlibat maupun yang akan terlibat dalam politik praktis sehingga dapat setia dengan nilai-nilai Kekristenan yang ada.

**Kata Kunci:** Pemikiran Prof. Dr. Warsito Utomo, Politik, Perpolitikan Nasional, Kristianitas.

**Lain-lain:**

viii + 86; 2016  
29 (1957-2013)

**Dosen Pembimbing:** Pdt. Dr. Wahyu Nugroho, M.A.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Politik merupakan salah satu aspek yang tidak bisa dipisahkan begitu saja dari kehidupan manusia secara komunal. Manusia hidup dalam suatu komunitas bangsa yang hidup dalam suatu lingkup kekuasaan secara politis. Demikian juga kita sebagai orang-orang Kristen di Indonesia ini, kita adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran politik.

Ketika kita-terutama orang Kristen-mendengar kata “politik”, terbesit dalam pikiran ada kesan negatif dalam memaknai kata tersebut; “keras”, “kotor”, “saling jegal”, “penuh intrik”, “manipulasi”, “korupsi”, “suap”, dan sebagainya. Apalagi sejak zaman kekristenan ditebarkan di Indonesia ini, sudah ada batasan bahwa gereja dan orang Kristen harus menjauhi dunia politik karena sifat “kenegatifannya” itu. Bahkan bila kita mengikuti perpolitikan di Indonesia melalui pemberitaan media pada akhir-akhir ini, yang muncul adalah berita-berita yang kurang sedap untuk dilihat dan didengar.

Bangsa Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, baik Pemilu untuk memilih anggota legislatif yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 maupun untuk memilih Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang lalu. Jemaat atau warga gereja merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang nantinya juga turut serta dalam pesta demokrasi tersebut.

Di dalam sejarah perpolitikan Indonesia sebelum diproklamirkannya Negara Republik Indonesia di tahun 1945, sesungguhnya telah terjadi „perang ideologi“ di antara kekuatan-kekuatan yang berpaham Nasionalis, Agama, Sosialis, Komunis, bahkan Perorangan atau Individual Partai.<sup>1</sup> Namun sebenarnya pondasi dasar untuk terciptanya keadilan dan perdamaian bagi bangsa yang *plural* ini sesungguhnya dan seharusnya dapat mudah untuk diwujudkan. Karena sabuk

---

<sup>1</sup> Warsito Utomo, “Nilai-nilai Perjuangan Untuk Keadilan dan Perdamaian dalam Perspektif Sosial Politik”, disampaikan pada *Diskusi Politik Menyongsong Pemilu 2014*, UGM, Yogyakarta, hlm.3.

pengamanan untuk kesatuan, keadilan, kebersamaan dan perdamaian secara internal sebagai Bangsa Indonesia telah dipatokkan.

Dengan penduduk Indonesia yang berkisar lebih kurang 240 juta yang mendiami pulau-pulau besar maupun beribu pulau-pulau kecil dengan aneka keberadaan keberagaman sosial, kultur dan ekonomi, menjadikan Negara Indonesia tidak mudah untuk membuat kebijakan “sama-sama rasa dan sama-sama rata”.<sup>2</sup>

Menurut Warsito Utomo<sup>3</sup> reformasi yang dicetuskan di bulan Mei 1998 untuk mengubah perpolitikan dan kehidupan sosial yang bertopang kepada *benevolent autocrat* yang menghasilkan pemerintahan yang ketat dan sentralistis dan yang hanya dinikmati seputar kelompok atau golongan tertentu, ternyata malah menumbuhkan penghidupan dan kehidupan yang porak poranda. Beban ekonomi malah bertambah berat dan belum terselesaikan; permasalahan politik justru menumbuhkan *euforia* politik; kehidupan sosial-kemasyarakatan justru sering dihantui oleh rusaknya tata aturan, tata hukum, tata nilai, bahkan tata budaya.

Semua hal ini disebabkan tidak saja oleh belum siapnya kita untuk reformasi, tetapi juga oleh ketidaksadaran kita bahwa reformasi harus kita lihat dan kita hadapi sebagai sesuatu yang *inevitable*. Sesuatu yang tidak dapat kita hindari dan harus kita hadapi. Reformasi bukan hanya terbatas kepada lingkup struktur, proses, atau prosedur, tetapi yang lebih penting adalah reformasi *behaviour*, reformasi yang menyentuh pada perubahan sikap mental.<sup>4</sup>

*Euforia* politik justru tidak menghasilkan proses di dalam menempatkan demokrasi sebagai nilai, *values*, tetapi justru sebagai suatu *interest* golongan, kelompok-kelompok. Dan akibatnya menumbuhkan ketidaksadaran bahwa sesungguhnya sebagai masyarakat yang *pluralis* kita harus memiliki *the ethics of*

---

<sup>2</sup> Warsito Utomo, “Nilai-nilai Perjuangan Untuk Keadilan dan Perdamaian dalam Perspektif Sosial Politik”, disampaikan pada *Diskusi Politik Menyongsong Pemilu 2014*, UGM, Yogyakarta, hlm.3.

<sup>3</sup> Warsito Utomo, *Kristianitas dalam Kancah Perpolitikan Nasional: Kumpulan Pemikiran Analitis tentang Nilai-nilai Kristiani dalam Perpolitikan di Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2014, hlm. 3.

<sup>4</sup> Warsito Utomo, *Kristianitas dalam Kancah Perpolitikan Nasional: Kumpulan Pemikiran Analitis tentang Nilai-nilai Kristiani dalam Perpolitikan di Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2014, hlm. 3.

*pluralism* yang tinggi. Tetapi ternyata yang terjadi adalah keinginan-keinginan untuk merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan, tumbuh keinginan untuk melepaskan diri sebagai Negara bagian bukan tetap sebagai bagian Negara, ide federalisme muncul tidak lagi sebagai wacana tetapi sebagai keinginan yang dipaksa untuk terealisasi, diterapkan dalam waktu dekat.<sup>5</sup>

Situasi Indonesia yang seperti ini haruslah kita hadapi bukan dengan ketakutan-ketakutan atau malahan eksklusif, tetapi justru merupakan tantangan dan kesempatan (*challenge and opportunity*) untuk kita tunjukkan, memasyarakatkan, dan mengaplikasikan nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai yang berorientasi kepada ketulusan, tidak mengedepankan *power* (kekuasaan); *concern* terhadap mereka yang tertindas, tersingkir, terabaikan, dan mereka yang lemah; komitmen kepada karyawan; dan orientasi kepada kerja.

Keyakinan atau *proficient entity* kita di dalam iman yang dilandasi oleh nilai-nilai tersebut akan menumbuhkan kemandirian dan *empowering*, dan itu semua akan menambah *reinforces trust* pada kita, yang akhirnya akan membuat lingkungan, masyarakat, menjadi *respect* terhadap kita.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis merasa perlu mengelaborasi atau menggali lebih dalam pemikiran-pemikiran Warsito Utomo dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pemikiran Prof. Dr. Warsito Utomo tentang Kristianitas dalam Kancah Perpolitikan Nasional”**.

## **2. Rumusan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah:

- a. Bagaimana pemikiran Prof. Dr. Warsito Utomo tentang kristianitas dalam kancah perpolitikan nasional?

---

<sup>5</sup> Warsito Utomo, *Kristianitas dalam Kancah Perpolitikan Nasional: Kumpulan Pemikiran Analitis tentang Nilai-nilai Kristiani dalam Perpolitikan di Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2014, hlm. 4.

<sup>6</sup> Warsito Utomo, *Kristianitas dalam Kancah Perpolitikan Nasional: Kumpulan Pemikiran Analitis tentang Nilai-nilai Kristiani dalam Perpolitikan di Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2014, hlm. 4.

- b. Apakah jemaat, gereja, dan masyarakat Kristen memahami betul posisi dan perannya dalam perpolitikan nasional?

### **3. Pemilihan Judul**

#### **PEMIKIRAN PROF. DR. WARSITO UTOMO TENTANG KRISTIANITAS DALAM KANCAH PERPOLITIKAN NASIONAL.**

Maksud judul penelitian ini adalah menganalisis pemikiran Warsito Utomo khususnya yang berhubungan dengan kristianitas dalam kancah perpolitikan nasional. Pemikiran Warsito Utomo ini merupakan pemikiran analitis tentang nilai-nilai kristiani dalam perpolitian di Indonesia, sehingga diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman jemaat dan masyarakat Kristen terkait dengan perpolitikan nasional. Dengan demikian jemaat lebih siap untuk menentukan sikap dan terlibat dalam perpolitikan dengan melihat pemikiran Prof. Dr. Warsito Utomo yang berbicara secara khusus mengenai Pemilu 2014 namun juga dapat menjadi refleksi secara umum untuk keterlibatan jemaat atau gereja dalam dunia politik.

### **4. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah untuk mengetahui pemikiran Warsito Utomo khususnya tentang kristianitas dalam kancah perpolitikan nasional yang merupakan kumpulan pemikiran analitis tentang nilai-nilai Kristiani dalam perpolitikan di Indonesia.

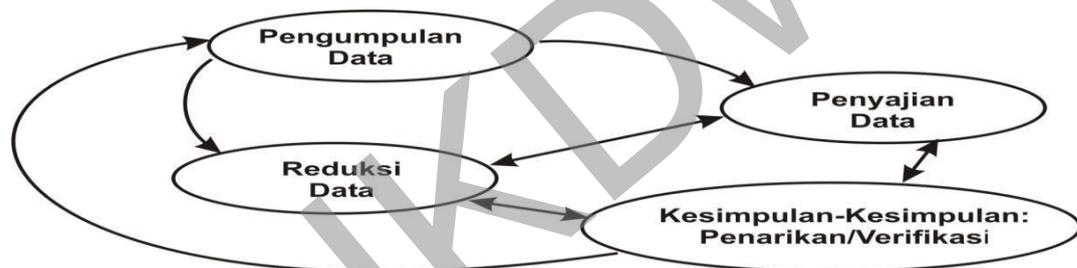
### **5. Metodologi Penelitian**

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik dengan cara menuliskan data yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, serta menuliskan data dari buku-buku yang ada relevansinya untuk memperoleh data kepustakaan.

Oleh karena itu penulis menggunakan sumber yang diperlukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Adapun sumber primer skripsi ini adalah karya-karya intelektual dari Prof. Dr. Warsito Utomo, khususnya yang

berjudul “Kristianitas dalam Kacah Perpolitikan Nasional: Kumpulan Pemikiran Analitis tentang Nilai-nilai Kristiani dalam Perpolitikan di Indonesia”, yang diterbitkan oleh Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia di Yogyakarta pada bulan Februari 2014. Selain itu, penulis juga menggunakan karya intelektual penulis lain yang menulis pemikiran-pemikiran beliau.

Selanjutnya analisis dilakukan dengan analisis model interaktif dari Miles dan Huberman<sup>7</sup> untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dikembangkan yang dalam hal ini adalah upaya sikap gereja yang konstruktif dalam hubungannya dengan pluralitas agama Islam pasca era Soeharto. Proses analisis model interaktif ini dapat disajikan dalam bentuk Gambar 1 berikut ini:



**Gambar 1 Analisis Data Model Interaktif<sup>8</sup>**

Adapun proses analisis analisis interaktif berlangsung melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Proses reduksi bertujuan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi bahan empirik sehingga dapat diperoleh kategori-kategori tematik. Dalam tahap ini data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang terinci dan lengkap, dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Kegiatan dalam reduksi data ini berarti

<sup>7</sup> Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. UI Press, Jakarta, 1992, hlm. 20.

<sup>8</sup> Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. UI Press, Jakarta, 1992, hlm. 20.

suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>9</sup>

a. Penyajian data atau display data

Setelah data disajikan, karena masih ada data yang kurang maka pengumpulan data di lapangan dilakukan kembali sampai data menjadi lengkap. Penyajian data atau display data dimaksudkan agar memudahkan untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penyajian data disampaikan dalam bentuk kualitatif.<sup>10</sup>

b. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Selanjutnya analisis disusun dan diarahkan pada fokus penelitian untuk disimpulkan dan kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung agar memudahkan pada kesimpulan akhir. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian. Penarikan kesimpulan bukan sesuatu yang berlangsung linier, melainkan merupakan suatu siklus yang interaktif, karena menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan gambaran dan pengertian yang mendalam, komprehensif, yang rinci mengenai suatu masalah sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan yang induktif.<sup>11</sup>

## 6. Telah Pustaka

Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah Teori Poskolonialisme dalam Studi Teologi. Meskipun bagi banyak orang istilah poskolonialisme masih terasa asing dan masih ada sementara kritik yang mengatakan bahwa disiplin ilmu ini

---

<sup>9</sup> Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. UI Press, Jakarta, 1992, hlm. 20

<sup>10</sup> Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. UI Press, Jakarta, 1992, hlm. 20.

<sup>11</sup> Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. UI Press, Jakarta, 1992, hlm. 20.

tidak memiliki suatu “momen yang orisinal” atau sebuah metodologi yang koheren, bidang kajian ini semakin mendapat perhatian dan mempunyai pengaruh luas di wilayah kajian filsafat dan ilmu-ilmu sosial lainnya.<sup>12</sup> Buku-buku yang dianggap punya wibawa ilmiah dalam kajian tersebut semakin banyak dan tersebar luas. Di kalangan komunitas intelektual di Indonesia kita bisa membaca karya-karya Simon Philpott: *Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism and Identity* (diterjemahkan dengan judul: Meruntuhkan Indonesia), Budi Susanto SJ: *Imajinasi Penguasa dan Identitas Postkolonial dan Politik dan Postkolonialitas di Indonesia*, Razif Bahari: *Pramoedya Postcolonially*, Martin Lukito Sinaga: *Identitas Poskolonial “Gereja Suku” dalam Masyarakat Sipil*, Mudji Sutrisno SJ dan Hendar Putranto (ed.): *Hermeneutika Pascakolonial*.<sup>13</sup> Dalam studi politik, kebudayaan, kesusastraan, dan sejarah agama itu para pemikir tersebut mencoba untuk memanfaatkan poskolonialisme sebagai instrumen kerja ilmiah bagi disiplin ilmu mereka.

Dalam bidang teologi, poskolonialisme juga digunakan sebagai instrumen untuk merefleksikan tema-tema teologis, baik dalam studi biblis, teologi sistematis, maupun teologi praksis. Beberapa judul buku berikut mencerminkan variasi tema-tema teologis yang digarap dengan memanfaatkan poskolonialisme tersebut: *Postcolonial Theologies: Divinity and Empire* (Catherine Keller), *The Touch of Transcendence: A Postcolonial Theology of God* (Mayra Rivera), dan *Postcolonial Reconfigurations: An alternative Way of Reading the Bible and Doing Theology* (R.S. Sugirtharajah).<sup>14</sup> Menurut hemat penulis, di kalangan teolog dan filosof di Indonesia poskolonialisme belum mendapat perhatian luas,

---

<sup>12</sup> Leela Gandhi, *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat* (terj.), Yogyakarta: Qalam, 2007, hlm xxi.

<sup>13</sup> Simon Philpott, *Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism and Identity*, New York: St. Martin's press, 2000; Budi Susanto SJ, *Imajinasi Penguasa dan Identitas Postkolonial*, Yogyakarta: Kanisius, 2000 dan *Politik dan Postkolonialitas di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2003); Razif Bahari, *Pramoedya Postcolonially*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2007; Martin L. Sinaga, *Identitas Poskolonial “Gereja Suku” dalam Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKIS, 2004; Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Hermeneutika Pascakolonial*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.

<sup>14</sup> Chatrine Keller Cs (ed.), *Postcolonial Theologies: Divinity and Empire*, St. Louis: Chalice Press, 2004; Mayra Rivera, *The Touch of Transcendence: A Postcolonial Theology of God*, London, Westminster John Knox Press, 2007; R.S. Sugirtharajah, *Postcolonial Reconfigurations: An alternative Way of Reading the Bible and Doing Theology*, St. Louis, Chalice Press, 2003.

namun demikian diskusi dan wacana tentang bidang ini di sana-sini sudah mulai terasa. Bagi para teolog yang mulai merintis “*postcolonial theology*” poskolonialisme memberikan sumbangan tersendiri bagi studi teologi. Cathrine Keller, sebagai contoh, dalam pengantar karyanya, *Postcolonial Theologies*, mengatakan “*But we use postcolonial theory in ways that commit us to something more than theory—that is, to an engaged and engaging theology, a work of resistance to the layered, ongoing, and novel colonizations of the planet*”<sup>15</sup>. Bagi Keller Teologi Poskolonial membumikan teologi sebagai disiplin ilmu yang “terlibat”, sekaligus memperjelas keyakinan bahwa agama dan teologi mempunyai peran dan kekuatan penting bagi proses transformasi sosial.

Dengan memperkenalkan poskolonialisme untuk kajian teologi penulis bermaksud menunjukkan makna dan sumbangan poskolonialisme bagi studi teologi di Indonesia. Ada dua alasan pokok yang melatarbelakangi pemikiran penulis untuk memperkenalkan poskolonialisme dalam studi teologi di Indonesia, yakni alasan teoretis dan alasan praksis. Sebagai alasan teoretis, kita bisa melihat bahwa studi teologis harus memanfaatkan atau menerima masukan disiplin ilmu lain untuk melakukan objek kajiannya, sehingga refleksi teologi bisa sungguh-sungguh melayani umat beriman. Catherine Keller menulis, “*We need—as theology has always needed whether it admits it or not—timely theories that can better attune our faith to the new problems and potentialities of its context*”<sup>16</sup>. Selanjutnya, dalam kaitan sumbangan poskolonialisme untuk studi biblis ia menegaskan “*Postcolonial Theory facilitates new readings of scripture and of the history of the interpretation of scripture, helping to uncover their complex ties to empire*”<sup>17</sup>. Baik studi tafsir kitab suci maupun teologi sistematis, keduanya

---

<sup>15</sup> Keller, Cathrine Cs, *Postcolonial Theologies: Divinity and Empire*, St. Louis: Chalice Press, 2004, hlm xxi.

<sup>16</sup> Keller, Cathrine Cs, *Postcolonial Theologies: Divinity and Empire*, St. Louis: Chalice Press, 2004, hlm 6

<sup>17</sup> Keller, Cathrine Cs, *Postcolonial Theologies: Divinity and Empire*, St. Louis: Chalice Press, 2004, hlm 10.

menuntut pemahaman akan perkembangan terus menerus ilmu-ilmu sosial supaya bisa memanfaatkan sumbangan ilmu-ilmu tersebut secara optimal. Kepekaan terhadap perkembangan ilmu-ilmu bantu lainnya, terutama poskolonialisme, tidak menutup kemungkinan, jika memang diperlukan, untuk “mendekolonisasi” metodologi filsafat atau teologi, yang *de facto* masih dikuasai oleh kerangka epistemologi barat.

Sebagai alasan praksis, poskolonialisme menyumbangkan perspektif yang membuat teologi tidak sekedar sebagai karya teoretis yang terpisah dari realitas dan praktek kehidupan, tetapi poskolonialisme membuat teologi menjadi “*an engaged and engaging theology*”, yang punya pengaruh bagi proses-proses transformasi sosial. Di tengah “zaman baru” yang membentuk *locus theologicus* baru, yakni kondisi-kondisi pascakolonial, yang ditandai dengan fenomena kesadaran identitas-komunitas hibrida, pluralitas budaya, runtuhnya batas teritorial negara-bangsa atau ikatan budaya eksklusif, kompleksitas relasi kekuasaan dan pengetahuan, serta kompleksitas unsur-unsur lain di berbagai wilayah kehidupan (kosmopolitanisme, globalisasi), kajian-kajian bidang teologi membutuhkan instrument baru yang membantu untuk merefleksikan pengalaman iman manusia dan bahasa artikulasinya.

#### a. Definsi dan Sejarah Intelektual Poskolonialisme

Ada banyak definisi poskolonialisme, dan tentu saja tidak semuanya perlu penulis sajikan di sini, cukup beberapa yang mengarah dan mendukung maksud proposal ini. Kita berangkat dari istilah (situasi) poskolonial, kemudian beranjak ke definisi poskolonialisme. Banyak orang jatuh pada pengertian yang salah ketika mengasosiasikan terminus „*post*” kolonial dengan berakhirnya era kolonialisme. Kata “*post*” bukan pertama-tama berkaitan dengan periode atau masa setelah kolonial, tetapi lebih menunjuk pada pengertian “melampaui” kolonial. Cathrine Keller, professor teologi di Universitas Drew menegaskan, ““*Post*” in this discourse never means simply „after” but also „beyond”- as an

*ethical intention and direction*".<sup>18</sup> Poskolonial mencakup dimensi temporal (*what follows-the-colonial*) dan juga aplikasi kritis (apa saja yang mempertanyakan "*the colonial*"). Bagi Keller terminus "*post*" dalam poskolonial menunjuk pada, (1) "*The „period of time following the formal separation or „independence” of a „colony” or group of colonies from a governing „empire”*", dan (2) "*A critical idea, and so indicates the intention to go beyond the colonial in all its forms*". Berdasarkan ilustrasi situasi colonial tersebut Catherine Keller mendefinisikan, "*postcolonialism is a discourse of resistance to any subsequent related projects of dominance*".<sup>19</sup>

Menurut R.S Sugirtharajah, profesor Hermeneutik Biblis dari Universitas Birmingham, terminus poskolonial memuat sekurang-kurangnya tiga arti: 1) Dalam tataran historis, poskolonial memuat kondisikondis sosial, cultural, politis dari tata dunia dewasa ini, mengemukakan fakta-fakta kolonialisme budaya, politik dan ekonomi, dan menambahkan pengakuan akan ambiguitas dekolonisasi dan nekolonisasi yang terus berlangsung; 2) Sebagai bentuk wacana kritis, poskolonial telah memelopori analisis teks dan masyarakat. Ia menyuguhkan bacaan-bacaan oposisional, menyibak suara-suara yang tertekan. Ia tidak sekedar menginterogasi dominasi kolonial tetapi memberikan alternatif kritis; 3) Istilah itu juga mengimplikasikan posisi ideologis atau politis dari penafsir yang terlibat dalam teori dan praktek anti-kolonial dan anti globalisasi. Jika diterapkan dalam studi biblis, ia berusaha untuk membuka desain-desain kolonial baik dalam teks-teks biblis dan penafsirannya, dan berusaha untuk membaca teks dari konsern-konsern poskolonial seperti identitas, hibriditas, dan disapora.<sup>20</sup> Berdasarkan uraian tentang terminus poskolonial tersebut Sugirtharajah mengajukan definisi poskolonialisme sebagai berikut:

*Postcolonialism is not simply a physical expulsion of imperial power. Nor is it simply recounting the evils of the empire, and drawing a contrast with the nobility*

---

<sup>18</sup> Catherine Keller, *Postcolonial Theologies: Divinity and Empire*, St. Louis, MO: Chalice Press, 2004, hlm. 6.

<sup>19</sup> Catherine Keller, *Postcolonial Theologies: Divinity and Empire*, St. Louis, MO: Chalice Press, 2004, hlm. 7

<sup>20</sup> R.S Sugirtharajah, *Postcolonial Reconfigurations: An alternative Way of Reading the Bible and Doing Theology*, St. Louis, MO: Chalice Press, 2003, hlm. 4

*and virtues of natives and their culture. Rather, it is an active interrogation of the hegemonic systems of thought, textual codes, and symbolic practices which the West constructed in its domination of colonial subjects. In other words, postcolonialism is concerned with the question of cultural and discursive domination.*<sup>21</sup>

Selanjutnya kita akan melihat sekilas sejarah intelektual poskolonialisme. Banyak pemikir berpendapat bahwa munculnya poskolonialisme sangat dipengaruhi oleh tradisi pemikiran Marxisme dan poststrukturalisme atau postmodernisme. Leela Gandhi berpendapat bahwa analisis poskolonialisme, pada saatnya mengetahui utang sejarahnya pada para leluhur Marxisme.<sup>22</sup> Ia lebih lanjut menulis bahwa: Pemikiran poststrukturalisme telah menyediakan daya dorong yang lebih substansial bagi proyek kajian poskolonial melalui usulan-usulannya yang sangat jelas untuk telaah Barat terhadap kebudayaan Barat sendiri. Dalam mencari tema tinjauan ini, poskolonialisme juga telah melahirkan suatu pemahaman yang sangat spesifik atas dominasi Barat sebagai gejala dari suatu aliansi yang tidak menyeluruh antara kuasa dan pengetahuan. Jadi, dalam suatu tingkatan dari paradigma ekonomi pemikiran penganut Marxisme, poskolonialisme telah belajar mendiagnosa efek material dan implikasi kolonialisme sebagai suatu penyakit epistemologi di jantung rasionalitas barat dan juga belajar untuk mengamati problem universalisme/eurosentrisme yang sangat melekat dalam pemikiran Marxis itu sendiri.<sup>23</sup>

Gandhi, dengan demikian, mengisyaratkan bahwa bibit-bibit strategi pemikiran poskolonialisme, yang tercermin terutama dalam menganalisis bentuk dominasi-subordinasi dan dalam mengkritisi bentuk-bentuk struktur relasi yang opresif, yang mengalir dari “aliansi tidak menyeluruh antara kuasa dan pengetahuan”, diwarisinya dari tradisi para pemikir marxian dan kaum poststrukturalis atau postmodernis, seperti Michel Foucault dan Jacques Derrida.

---

<sup>21</sup> R.S Sugirtharajah, *Postcolonial Reconfigurations: An alternative Way of Reading the Bible and Doing Theology*, St. Louis, MO: Chalice Press, 2003, hlm. 15

<sup>22</sup> Leela Gandhi, *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat* (terj.), Yogyakarta: Qalam, 2007, hlm. 32

Secara lebih tegas lagi Gandhi, dalam pengantar karyanya, Teori Poskolonial, menulis bahwa kritik posstrukturalis terhadap epistemologi Barat dan teorisasi atas perbedaan kultural dan materialisme Marxian telah memberi landasan yang sangat kuat terhadap teori politik poskolonial.<sup>24</sup> Adanya keterkaitan dengan Marxisme dan poststrukturalisme atau postmodernisme inilah yang membuat para pemikir biasa mengkaitkan pemikiran para teoritikus poskolonialis seperti Edward Said dalam karyanya Orientalisme dengan pemikiran Foucault tentang wacana dalam *The Archeology of Knowledge* dan dalam *Discipline and Punish*, atau Gayatri Spivak yang melakukan analisis kesusastraan poskolonial dengan karya Derrida yang telah diterjemahkannya, *Of Grammatology*. Sementara itu, sumber-sumber pemikiran pemikir poskolonialis besar Algeria, Frantz Fanon, yang memanfaatkan analisis Marxian, yang bisa dilacak dalam karya-karyanya yang terkenal *The Wretched of The Earth*, *A Dying Colonialism*, *Black Skin White Mask*, *Toward The African Revolution* diyakini memberi pengaruh besar pada pemikiran poskolonialis yang lain yakni Homi K. Bhabha.

Dengan demikian, di satu pihak, sejarah intelektual poskolonialisme bisa diletakkan dalam konteks penyebaran pemikiran-pemikiran Marxian dan poststrukturalis atau postmodernis yang digunakan untuk menganalisis bidang-bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan sastra. Di lain pihak, kelahirannya dipicu oleh momentum yang turut membidani kelahirannya, yakni Globalisasi (neokolonialisme, liberalisme ekonomi), yang memunculkan persoalan-persoalan baru seperti identitas, budaya hybrid (kreol), multikulturalisme. Analisis Marxis dan postrukturalis dirasa kurang memadai untuk memberi penjelasan tentang fenomena identitas dan budaya, serta relasi-relasi kekuasaan dan pengetahuan yang semakin kompleks di era globalisasi tersebut. Ranah baru, atau "*locus philosophicus et theologicus*" baru, inilah yang menuntut perlunya sebuah disiplin ilmu yang melampaui analisis marxis dan poststrukturalis, yang kemudian dibangun dengan mengakomodasi berbagai disiplin ilmu (multidisipliner).

Selanjutnya, kalau ditinjau dari perkembangan bidang kajiannya, *postcolonialism* muncul pertama-tama sebagai sebuah aktivitas kritis dalam studi literatur di Negara persemakmuran atau dunia ketiga. Peristiwa ini, sebagaimana dikatakan oleh Harish Trivedi, merupakan fenomena pertama dimana Negara terjajah ditempatkan di pusat wacana akademis.

Menurut Sugirtharajah, karena berkembang pertama-tama dalam wilayah studi literatur poskolonialisme, awalnya dipandang sebagai sebuah sarana pedagogis, dan belum dilihat sebagai konsep teoretis. Baru kemudian Edward Said, Gayatri Spivak dan Homi K. Bhabha, memaknai poskolonialisme sebagai teori dan praktek. Ketiga filsuf tersebut berbicara dari sudut yang berbeda dan memobilisasi kategori filosofis dan konseptual yang berbeda. Namun ada kekuatan yang menyatukan mereka, yakni analisis poskolonialisme digunakan untuk menginvestigasi dan mengekspose ikatan antara pengetahuan dan kekuasaan di dalam produksi teks Barat. Dari tulisan-tulisan mereka tampak bahwa *postcolonialism* bisa dilihat sebagai “strategi membaca” ataupun sebagai sebuah kondisi atau keadaan. Sementara Said dan Spivak melihat poskolonialisme sebagai sebuah strategi membaca, Bhabha melihat poskolonialism sebagai “*acondition of being*”.<sup>25</sup>

Lebih lanjut Sugirtharajah melukiskan bahwa Poskolonialisme bukanlah sekedar sebuah pengusiran secara fisik kekuasaan imperial atau sekedar usaha menoleh kembali kejahatan imperium, dan melukiskan kontrasnya dengan keluhuran atau keutamaan orang-orang lokal atau budaya mereka. Namun, poskolonialisme merupakan sebuah konfrontasi aktif dengan sistem berpikir yang dominan, kepincangan, ketidak seimbangannya. Dengan demikian merupakan sebuah emansipasi diskursif dan sebuah proses budaya dari semua struktur-struktur dominan, entah itu bersifat politis, lingustik, maupun ideologis.

---

<sup>25</sup> R.S Sugirtharajah, *Postcolonial Reconfigurations: An alternative Way of Reading the Bible and Doing Theology*, St. Louis, MO: Chalice Press, 2003, hlm. 15.

Berangkat dari analisis- analisis tersebut Sugirtharajah membuat kesimpulan bahwa poskolonialisme mempunyai makna yang majemuk. Poskolonialisme bisa dipandang sebagai praktek membaca secara oposisional, atau sebagai sebuah cara mengkritik bentuk yang menotalisir kerangka pikir *europasentris* dan mengkritisi serta merumuskan ulang makna-makna yang dominan. Poskolonialisme juga bisa dipandang sebagai sikap mental daripada sebuah metode, lebih merupakan disposisi subversif terhadap pengetahuan dominan daripada sebuah aliran pemikiran. Disiplin baru ini bukan merupakan periodisasi, tetapi lebih merupakan sebuah sikap membaca; ia merupakan sebuah usaha kritis bertujuan untuk menelanjangi hubungan di antara ide dan kekuasaan. Merupakan resistensi diskursif terhadap imperialisme, ideologi imperial, perilaku imperial dan bentuk-bentuk penerusnya baik dalam wilayah politik, ekonomi, sejarah, teologi, maupun studi kitab suci.

Sebagaimana ditegaskan oleh teolog keturunan India ini, sebagai sebuah bentuk kritik antikolonial, poskolonialisme bukanlah barang baru. Dalam melawan penjajah dulu kaum terjajah menggunakan skema penjajah-terjajah untuk berjuang. Kaum terjajah terkunci oleh skema yang mereka gunakan untuk menghancurkan skema tersebut. Poskolonialisme melampaui skema pemikiran esensial dan kontrasif Barat-Timur, dan mencari proses rujuk yang radikal dari keduanya. Apa yang membedakan dari perjuangan lama adalah: selagi mengkritisi hakekat opresif dari kolonialisme, poskolonialisme menemukan potensionalitas kontak di antara penjajah dan terjajah. Dengan mengambil jarak dari sikap arogan bahwa pribumi itu luhur, sembari menghujat para penjajah, poskolonialisme merekonsiliasi-mengintegrasikan dua sisi tersebut. Poskolonialism sebagai usaha kritis merupakan sebuah bentuk “*act of exorcism*” baik bagi penjajah maupun terjajah. Sugirtharajah menandakan, “*For both parties it must be a process of liberation: from dependency, in the case of the colonized, and from the imperialist, racist perceptions, representations, and institutions which, unfortunately, remain with us till this very day, in the case of the colonizer*”.<sup>26</sup>

Selanjutnya, penting untuk dicatat bahwa Catherine Keller Cs juga mencoba untuk meletakkan tempat perspektif-perspektif poskolonialisme dalam sejarah intelektual teologi kristiani. Agaknya bukan sekedar merupakan keinsiden ketika mereka menemukan bahwa benih-benih perspektif “*poskolonial teologi*” bisa dilacak dari usaha-usaha teologi pembebasan yang telah dikenal sebagai disiplin teologi yang memanfaatkan kerangka analisis Marxis. Keller Cs mengatakan bahwa poskolonialisme membantu atau melengkapi analisis teologis yang dilakukan teologi pembebasan. Karena, teologi pembebasan hanya menganalisis 1) kekuatan-kekuatan Negara, ekonomi, dan budaya yang menindas, 2) menelanjangi bagaimana Gereja telah mengambil, membenarkan, dan mendapat keuntungan dari kekuatan-kekuatan tersebut, dan 3) menunjukkan caracara bagaimana kaum miskin dan tertindas telah menginternalisasikan pola-pola opresif yang mereka alami; sementara poskolonialisme bergerak lebih jauh, yakni membantu menganalisis cara- cara tertentu yang menunjukkan bahwa kristianitas, yang lahir sebagai gerakan kaum terjajah, bisa meniru cara-cara kaum penjajah.<sup>27</sup>

#### b. Pengaruh Kolonialisme Atas Tafsir Teks

Setelah menunjukkan beberapa definisi poskolonialisme, memberi ilustrasi sejarah intelektual, dan sejarah penggunaan kritisisme poskolonialisme, kini penulis akan menunjukan contoh yang diberikan oleh Sugirtharajah dalam memanfaatkan kritisisme poskolonialisme, baik sebagai “*a condition of being*” maupun sebagai strategi membaca, untuk menginterogasi pengaruh-pengaruh kolonialisme atas tafsir Kitab Suci dan teologi misi. Sugirtharajah melakukan analisis atas tafsir perintah misi dalam Matius (Mat 28, 19) dan rute perjalanan misi Paulus (Kis 13-14; 15,

---

<sup>26</sup> R.S Sugirtharajah, *Postcolonial Reconfigurations: An alternative Way of Reading the Bible and Doing Theology*, St. Louis, MO: Chalice Press, 2003, hlm. 16.

<sup>27</sup> Catherine Keller, *Postcolonial Theologies: Divinity and Empire*, St. Louis, MO: Chalice Press, 2004, hlm. 8.

40-18, 22; 18, 22-21, 16) karena dia mensinyalir tafsir atas kedua teks tersebut dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme.

Menurut penelitian Sugirtharajah, sejak zaman kolonialisme dan pasca kemerdekaan, dan lebih dari masa-masa sebelumnya, komentar-komentar atau penafsiran Matius 28, 19 mendapat tekanan yang luar biasa dan menjadi *text* yang sering dikutip dalam buku-buku komentar Kitab Suci untuk para mahasiswa teologi di India. Peristiwa yang terjadi seputar abad delapan belas dan sembilan belas ini bertepatan dengan kebangkitan imperialisme Barat.

Para komentator atau penafsir kitab suci pada periode sebelumnya mencari rujukan teks-teks lain untuk menunjukkan dimensi missioner kristianitas. Namun William Carey (1761-1834) dalam tulisan provokatifnya *An Enquiry into the Obligations of Christian to Use Means for the Conversion of the Heathen* menggunakan teks perutusan Matius tersebut sebagai teks yang membuktikan adanya perintah perutusan untuk memberitakan Injil ke tanah-tanah asing/misi. Dalam tulisan tersebut Carey tidak hanya mengemukakan kewajiban orang Kristen untuk menjadi pewarta ke tanah-tanah asing tetapi juga menunjukkan strategi missioner. Dengan demikian teks perutusan tersebut digunakan untuk menjadi dasar yang menentukan bagi usaha-usaha missioner yang diinstitusikan dari Gereja Kristen, biarpun dalam teks-teks lain institusionalisasi gerakan missioner ini tidak mendapat tekanan.

Sugirtharajah menilai bahwa penekanan yang kuat atas teks perutusan Matius tersebut, yang seolah secara institusional dan strategis “*me-mobilisasi*” orang kristiani untuk mempertobatkan bangsa-bangsa kafir di tanah-tanah yang jauh, rasanya kurang tepat jika dipadukan dengan spirit komunitas-komunitas Kristen sejauh direpresentasikan dalam Injil Matius, yang mempunyai pandangan yang cenderung negatif tentang “orang-orang kafir”. Karena mereka mempunyai pandangan negatif terhadap bangsa-bangsa kafir maka perintah perutusan kepada mereka sebenarnya merupakan tema yang asing bagi teks Matius. Sugirtharajah

menilai, *“These negative perceptions indicate that for Matthew the Gentile world is a foreign and godless place which must be avoided and, more importantly, whose practices must not be imitated by his readers”*.<sup>28</sup>

Penekanan institusionalisasi misi dan strateginya tersebut, yang direfleksikan dari perutusan Matius, berbarengan dengan suasana maraknya imperialism Barat. Cara membaca yang sama, sebagaimana dianalisis oleh Sugirtharajah, juga diterapkan oleh para ekseget era kolonialisme barat, ketika mereka menafsirkan kisah perjalanan misi Paulus yang tertuang dalam Kisah Para Rasul. Kisah Perjalanan Paulus digunakan oleh para ekseget sebagai model dan pola misi Gereja ke tanah- tanah asing yang kafir, dan cara membaca semacam ini sangat bertautan satu sama lain dengan iklim ekspansi imperialisme ke daerah-daerah koloni saat itu. Sugirtharajah dalam uraian yang panjang menunjukkan bahwa penekanan atas tiga perjalanan misi Paulus, dari “pusat” kristianitas ke daerah-daerah “kafir” menunjukkan bahwa cara membaca teks semacam itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan kolaborasi antara gerakan misi dan kepentingan ekspansi kolonialisme. Dengan merujuk studi ekseget lain dia menunjukkan bahwa skema atau perjalanan misi Paulus ke daerah-daerah kafir yang sesungguhnya hanya terjadi sekali, sementara dua perjalanan lain tidak bisa dibaca sebagai perjalanan misi ke wilayah kafir yang jauh. Cara menafsir tendensius semacam ini bisa terjadi karena *“once the impediment to missionary work was removed, the missionaries themselves became willing supporters of commercial expansion”*.<sup>29</sup> Cara membaca teks semacam inilah yang perlu dikritisi, dan dalam spirit poskolonialisme, kita perlu membaca teks tersebut secara *“contrapuntal.”* Artinya, cara membaca semacam itu harus dikritisi dengan membandingkannya, baik dengan cara-cara menafsirkan pada awal kristianitas, di era sebelum imperialism barat, maupun dari perspektif

---

<sup>28</sup> R.S Sugirtharajah, *Postcolonial Reconfigurations: An alternative Way of Reading the Bible and Doing Theology*, St. Louis, MO: Chalice Press, 2003, hlm. 21.

<sup>29</sup> R.S Sugirtharajah, *Postcolonial Reconfigurations: An alternative Way of Reading the Bible and Doing Theology*, St. Louis, MO: Chalice Press, 2003, hlm. 24.

masa kini. Dengan demikian strategi membaca poskolonialistik bisa merupakan “*act of exorcism*”, yang menelanjangi bentuk-bentuk hegemoni tafsir baik dalam membaca teks-teks Kitab Suci (Studi Biblis) maupun asumsi-asumsi teologis yang mengalir darinya (Studi teologi sistematis dan praksis).

## **7. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penulisan, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

### **BAB II DEMOKRASI PANCASILA DAN DEMOKRASI INDONESIA**

Bab kedua ini berisi tentang demokrasi Pancasila sebagai pilar demokrasi Indonesia dan pemikiran Prof. Dr. Warsito Utomo tentang etika berdemokrasi di Indonesia.

### **BAB III POLITIK AGAMA-AGAMA DI INDONESIA**

Bab ketiga ini berisi tentang sejarah perpolitikan di Indonesia dikaitkan dengan kemajemukan agama di Indonesia serta pemikiran Prof. Dr. Warsito Utomo mengenai kehidupan berpolitik dan kehidupan beragama di Indonesia.

### **BAB IV PEMIKIRAN PROF. DR. WARSITO UTOMO TENTANG KRISTIANITAS DALAM KANCAH PERPOLITIKAN NASIONAL**

Bab keempat ini berisi analisis dari pemikiran Prof. Dr. Warsito Utomo tentang kristianitas dalam kancah perpolitikan nasional di Indonesia.

### **BAB V REFLEKSI TEOLOGIS DAN KESIMPULAN**

Bab terakhir ini berisi jawaban dari permasalahan yang diangkat dan dikaji.

## **BAB V**

### **REFLEKSI TEOLOGIS DAN KESIMPULAN**

#### **1. Refleksi Teologis**

Banyak umat Kristen yang menyadari bahwa dunia sulit dilepaskan dari yang disebut dengan politik kekuasaan seperti yang Machiavelli katakan. Politik kekuasaan merupakan suatu kekuatan besar dan motivasi utama semua pelaku politik. Jika kita memikirkan politik, yaitu menjadi penguasa dengan menanggalkan seluruh kepentingan individu demi kesejahteraan seluruh masyarakat dan demi tatanan negara yang baik, adil dan sejahtera, hal itu hanya bisa ditemukan dalam slogan-slogan negara, dalam impian-impian pemerintahan, tetapi tidak akan pernah ditemukan di dalam realitas yang asli. Selain pandangan itu, banyak umat Kristen yang menyatakan bahwa politik kekuasaan pada hakekatnya baik. Kita tidak perlu mempersalahkan politik kekuasaan, hanya saja menganulir atau meminimalisir semua unsur negatif di dalamnya, seperti perilaku yang licik, berbagai intrik dan tindakan kejahatan untuk mempertahankan kekuasaan.

Kekristenan atau Kristianitas melihat pentingnya kita memulai seluruh pemikiran politik dari sudut pandang Allah. Karena Allah adalah Pencipta seluruh alam semesta, termasuk juga manusia. Pengelolaan seluruh alam dan isinya harus kembali sesuai dengan rencana dan maksud Allah ketika mencipta semesta ini. Tanpa Pencipta, tidak ada seluruh ciptaan. Tanpa kembali pada Pencipta, tidak ada jawaban yang sah bagi seluruh kehidupan masyarakat, tujuan kehidupan sosial, dan arah pemerintahan dunia, Allah yang memberikan arah, makna, dan penghakiman atas segala pembenaran manusia, termasuk bidang politik. Dengan demikian, Allah sebagai Pencipta tidak bisa tidak harus menjadi pertimbangan pertama. Dengan memperhatikan Allah yang mencipta, maka pemerintahan dunia juga harus disadari sebagai pemerintahan turunan, yang makna, tujuan, dan nilainya harus dikembalikan pada Allah.

Selain itu, Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Allah telah memberikan teladan di dalam melakukan pemerintahan. Pemerintahan Allah

adalah pemerintahan yang sangat baik, dimana seluruh pemerintahan menyatakan seluruh sifat Ilahi-Nya, menyatakan seluruh tujuan dan bahkan memberikan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbaik. Meninggalkan Allah di dalam membicarakan tentang politik telah membuang teladan dan prinsip terbaik bagi seluruh pemerintahan dunia. Namun, seperti telah dinyatakan di Alkitab juga, bahwa manusia ternyata tidak suka akan apa yang Allah telah lakukan. Manusia ingin memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel, sekalipun hal itu ditunjukkan akan menghasilkan dampak buruk bagi manusia itu sendiri (Samuel 8:1-22). Manusia dengan sengaja dan tegas menolak pemerintahan Allah yang terbaik, lalu menganggap mereka bisa melakukan pemerintahan mereka sendiri. Tetapi terbukti, akhirnya mereka tetap membutuhkan pertolongan Allah, ketika mereka sudah rusak dan mengalami berbagai macam penderitaan sebagai akibatnya. Format ini berulang diungkap dalam kitab Raja-Raja. Jika Allah meninggalkan umat-Nya sama sekali dan tidak peduli sama sekali, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Tetapi Allah begitu kasih, sehingga Ia masih mau menolong. Namun, sekali lagi, kasih ini disalahgunakan hingga hari ini. Allah hanya dipakai sebagai aksesori ketika manusia sudah bermasalah. Jika semua lancar, maka manusia ingin bermain sendiri, memerintah menurut kehendaknya sendiri. Inilah fakta yang harus menjadi paradigma pertama kita melihat pemerintahan dan politik.

Selain itu muncul pula tokoh-tokoh Alkitab yang terlibat dalam pergumulan politik kekuasaan seperti Musa dan Elia walaupun mereka berada diluar lingkaran kekuasaan maupun yang berada dekat dengan lingkaran kekuasaan seperti Yusuf di Mesir dan Daniel di Kerajaan Babilonia, kesemuanya itu sebenarnya hendak menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang beriman hendaknya mau terlibat dalam perpolitikan karena tujuan politik kekuasaan itu sebenarnya adalah pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang kecil, lemah, tersingkir dan marginal agar dapat tercipta suatu *civil society*<sup>111</sup>.

---

<sup>111</sup> Ngelow, Zakaria dalam *Teologi Politik (Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru)*, Makasar: Yayasan OASE INTIM, 2013, hlm 25.

Hal yang sama sebagaimana diperjuangkan oleh para nabi juga diperjuangkan oleh Yesus dari Nazaret dengan berbagai karya-Nya hingga pemberian diri dan wafat-Nya di kayu salib. Yesus berusaha memperjuangkan mereka yang tersingkir dan marginal namun yang khas dimiliki oleh Yesus adalah perjuangan-Nya yang teguh berpegang pada prinsip pantang kekerasan (*non-violence*). Disini menjadi suatu perenungan bersama bagaimana suatu keadaban publik atau *civil society* dengan menggunakan cara-cara yang tidak menggunakan cara kekerasan.

Dalam Injil Matius disebutkan pula mengenai hubungan antara negara dan agama yang berkaitan dengan penggunaan kekuasaan politik yaitu “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Matius 22:21). Hal ini mengandung pemahaman pemisahan yang tegas antara negara dan gereja (agama). Sehingga tidak ada yang boleh mengklaim diri sebagai pemilik kekuasaan mutlak. Oleh karena itu mengandung implikasi bahwa baik negara (penguasa) dan gereja beserta masyarakat umum selayaknya harus lebih tunduk kepada Allah yang merupakan Sumber Kebaikan dan Kebenaran tertinggi seperti yang diungkapkan dalam Kisah Para Rasul: “Kita harus tunduk kepada Allah dari pada kepada manusia” (Kisah Para Rasul 5:29).

Dalam kitab Roma yang dipandang sebagai tulisan Rasul Paulus muncul suatu permasalahan mengenai ketaatan kepada pemerintah atau penguasa. Namun kekuasaan yang dimiliki pemerintah juga bukan kekuasaan yang mutlak karena setiap kuasa yang ada di muka bumi ini harus tunduk dan takluk kepada Yesus yang adalah Tuhan (Filipi 2:10-11). Sehingga kekuasaan yang ada seharusnya dapat dipergunakan untuk kehidupan bersama yang lebih baik.

## **2. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pemikiran Prof. Dr. Warsito Utomo tentang Kristianitas dalam kancah politik nasional mengungkapkan politik sangat diperlukan dalam upaya mencapai masyarakat yang baik. Seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai, dan lain sebagainya. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa dalam pelaksanaan kegiatan politik, di samping segi-segi yang baik, mencakup pula segi-segi yang negatif. Hal ini disebabkan oleh karena politik mencerminkan tabiat manusia. Baik nalurnya yang buruk maupun nalurnya yang baik. Tidak heran apabila dalam realitas politik seringkali kita berhadapan dengan banyak kegiatan politik yang tidak terpuji. Kegiatan politik yang demikian ini akan berakhir menjadi perebutan kekuasaan, tahta dan harta. Politik hanya sekedar sebagai upaya perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Dengan alasan ini maka, barangkali, di sinilah letak pentingnya kristianitas seseorang di dalam aktivitas politik. Menurut pendapat penulis agama tanpa politik akan menjadi tidak menarik, sebaliknya, politik tanpa agama dalam hidup bernegara proses-proses politik akan terjadi banyak penyimpangan.
- b. Penulis sependapat dengan Prof. Dr. Warsito Utomo bahwa jemaat, gereja, dan masyarakat kristen belum memahami betul posisi dan perannya dalam perpolitikan nasional. Penulis juga sependapat dengan Prof. Dr. Warsito Utomo yang menyatakan gereja lebih menekankan aktivitasnya pada pendalaman, penguatan kekuatan moral (*moral force*) bagi anggotanya atau jemaatnya. Dengan demikian, gereja tidaklah berkiprah didalam kegiatan politik praktis, praktika, atau implementasi politik, tetapi lebih kepada penciptaan dan pengingatan politik dan cara politik yang *elegant*, yang benar, yang tepat. Gereja memperkuat jemaatnya untuk menggunakan sarana perpolitikan dengan benar dan tepat yang didasarkan pada nilai-nilai Kristiani. Prof. Dr. Warsito Utomo juga menyatakan gereja mendudukan dirinya sebagai komponen *moral force* yang diberikan kepada warga atau jemaatnya sebagai pegangan pada saat mereka terjun dalam dunia politik praktis didalam kancah perpolitikan, Negara, dan pemerintah. Sedangkan bagi umat Kristiani yang akan terjun didalam politik praktis (kepartaian, organisasi

massa, anggota parlemen, pejabat politis) mengasahkan diri mereka dengan teknik-teknik dan strategi-strategi perpolitikan. Sehingga mereka menjadi memiliki kemampuan, ketrampilan, dan kesuksesan di dalam kancah perpolitikan praktis. Trik-trik yang mereka pergunakan, yang mereka pahami dengan familier dapat sebanding dengan yang dimiliki oleh komponen-komponen lain. Untuk itu pendidikan yang membantu pemahaman politik dapat dilakukan melalui setiap aras pelayanan yang ada mulai dari tingkat Sinode, Klasis sampai dengan Jemaat.

©UKDWN

## Daftar Pustaka

- Abueva, Jose, Demokratisasi di Indonesia, “*Harmonisasi antara elemen-elemen Utama dengan Nilai-Nilai Universal Demokrasi dan Hak Azasi Manusia*”, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol. 1 No.3, Maret-Juni 2003.
- Alfian, *Hasil Pemilihan Umum 1955: Untuk DPR*. Jakarta: Leknas-LIPI, 1971.
- Andrain, Charles F., *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Bahari, Razif, *Pramoedya Postcolonially*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2007
- Cribb, Robert dan Kahin, Audrey, *Historical Dictionary of Indonesia*. Toronto: Scarecrow Press, 2004.
- Darmodiharjo, Darji dan Yuwono, Sutopo, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1994.
- Feith, Herbert, *The Indonesian Elections of 1955*. Ithaca, N.Y: Cornell University Modern Indonesia Project, 1957.
- Gandhi, Leela, *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat* (terj.), Yogyakarta: Qalam, 2007.
- Indrayana, Denny, “*Indonesia dibawah Soeharto: Order Otoliter Baru*” *Amandemen UUD 1945: antara mitos dan pembongkaran*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007

Janowitz, M. and Segal, D.R., "Social Cleavage and Party Affiliation: Germany, Great Britain, and the United States", *American Journal of Sociology*, Vol. 72, 1989.

Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Keller, Chitrine Cs, *Postcolonial Theologies: Divinity and Empire*, St. Louis: Chalice Press, 2004

Madjid, Nurcholis, *Indonesia Kita*, Jakarta: Paramadina, 2003.

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. UI Press, Jakarta, 1992.

Ngelow, Zakaria, Julianus Mojau dan John Campbell-Nelson (dkk);(eds), *Teologi Politik (Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru)*, Makasar: Yayasan OASE INTIM, 2013.

Philpott, Simon, *Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism and Identity*, New York: St. Martin's press, 2000.

Ricklefs, M.C., *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. Macmillan Asian Histories Series: Macmillan Press, 1981.

Rivera, Mayra, *The Touch of Transcendence: A Postcolonial Theology of God*, London, Westminster John Knox Press, 2007.

Sinaga, Martin L., *Identitas Poskolonial "Gereja Suku" dalam Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKIS, 2004.

- Sinamo, Nomensen, *Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara* Jakarta: Permata Aksara, 2012.
- Sirait, Saut Hamonangan. *Politik Kristen di Indonesia (Suatu Tinjauan Etis)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Sugirtharajah, R.S., *Postcolonial Reconfigurations: An alternative Way of Reading the Bible and Doing Theology*, St. Louis, Chalice Press, 2003.
- Susanto SJ, Budi, *Imaginasi Penguasa dan Identitas Postkolonial*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Susanto SJ, Budi, *Politik dan Postkolonialitas di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Sutrisno, Mudji dan Putranto, Hendar, *Hermeneutika Pascakolonial*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Syam, Mohamad Noor, *Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia, Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional*, Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 2000.
- Utomo, Warsito, "Nilai-nilai Perjuangan Untuk Keadilan dan Perdamaian dalam Perspektif Sosial Politik", disampaikan pada *Diskusi Politik Menyongsong Pemilu 2014*, UGM, Yogyakarta.
- Utomo, Warsito, *Kristianitas dalam Kancah Perpolitikan Nasional: Kumpulan Pemikiran Analitis tentang Nilai-nilai Kristiani dalam Perpolitikan di Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2014
- Wahyono, Padmo, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP7 Pusat, 1991.